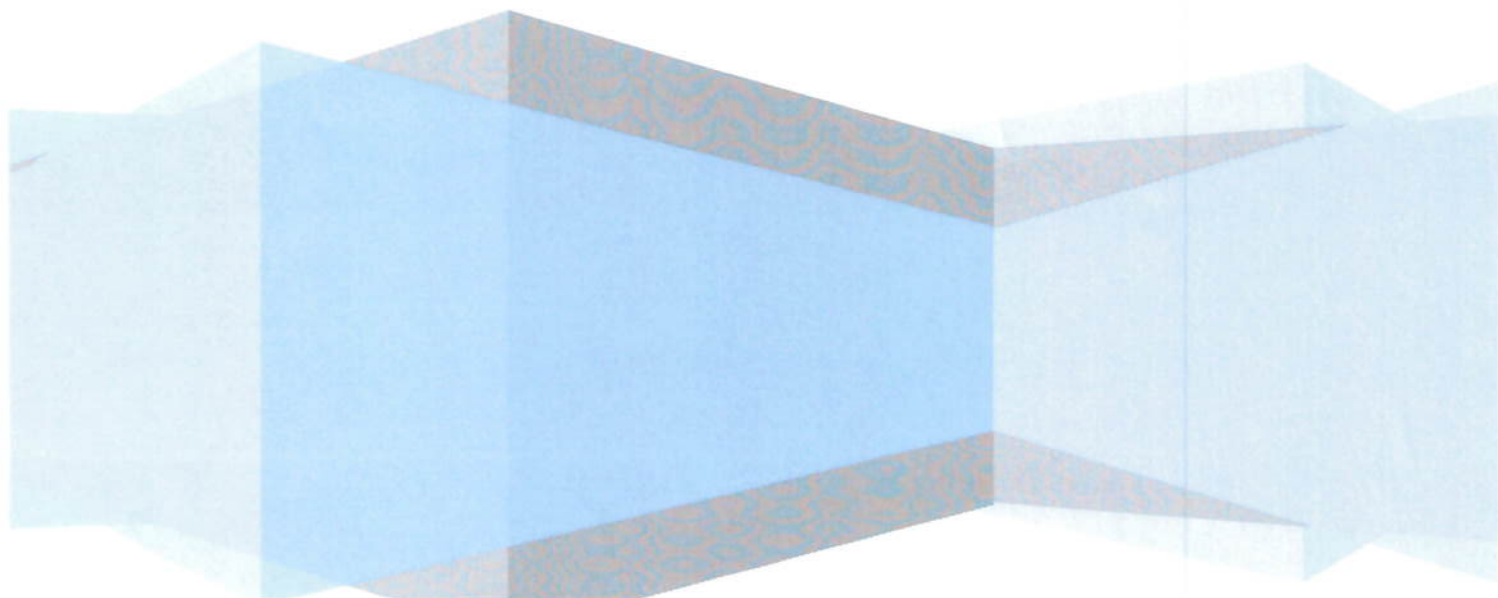


PENGADILAN NEGERI GRESIK
005.03.0500.099138.000.KD

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Per 30 Juni Tahun 2025





LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI GRESIK
005.03.0500.099138.000.KD
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. Raya Permata No. 6 Kebomas
Gresik - Jawa Timur 61121
Telp. (031) 51169931 Fax. (031) 51169931
e-mail : pngresik.umumkeu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Gresik adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Gresik. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gresik, 1 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

IBNU SOLA, S.H., M.M.
NIP. 196709071993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
RINGKASAN.....	vxii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	viii
NERACA.....	ix
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. Dasar Hukum	13
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gresik	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi.....	17
A.5. Dasar Pengukuran.....	18
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	26
B.1 Pendapatan	26
B.2 Belanja.....	27
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	31
C.1. Aset Lancar	31
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	31
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	31
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.2.1. Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.2.2. Utang yang Belum Ditagihkan.....	32

C.4.5. Uang Muka dari KPPN	33
C.5 Ekuitas	33
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	43
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	43
D.3 Beban Persediaan	43
D.4 Beban Barang dan Jasa	43
D.5 Beban Pemeliharaan	44
D.6 Beban Perjalanan Dinas	44
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45
D.9 Kegiatan Non Operasional	46
D.10 Pos Luar Biasa	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	51
E.1 Ekuitas Awal	51
E.2 Surplus/Defisit LO	51
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	51
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	51
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	51
E.5 Transaksi Antar Entitas	51
E.6 Ekuitas Akhir	52
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA ..	53
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	54

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	16
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	16
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025.....</i>	16
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	16
<i>Tabel 5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	20
<i>Tabel 6. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	20
<i>Tabel 7. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	20
<i>Tabel 8. Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	43
<i>Tabel 9. Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	43
<i>Tabel 10. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	44
<i>Tabel 11. Rincian Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	44
<i>Tabel 12. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	45
<i>Tabel 13. Rincian Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	45
<i>Tabel 14. Rincian Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2025 dan TA 2024.....</i>	52

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6 Kebomas Gresik - Jawa Timur 61121

Telp. (031) 51169931 Fax. (031) 51169931 e-mail : pngresik.umumkeu@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gresik yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gresik, 1 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

IBNU SOLA, S.H., M.M.
NIP. 196709071993031001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp41.251.500,00 atau mencapai 46.94% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp87.890.000,00. Realisasi Belanja Negara 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp84.113.888,00 atau mencapai 40.41% dari alokasi anggaran sebesar Rp208.157.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp176.153.347.533,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp176.153.347.533,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp176.153.347.533,00 dan Rp5.612.856,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp0,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp54.429.673,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/defisit-LO sebesar (Rp54.429.673,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 5.612.856,00 dikurangi surplus/defisit-LO sebesar (Rp54.429.673,00). ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp2.029.345,00) kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar Rp. 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp52.400.328,00. sehingga Ekuitas entitas pada 30 Juni 2025 adalah senilai Rp3.583.511,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI GRESIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	87,890,000.00	41,251,500.00	124	77,385,000.00	41,508,500.00	54
Jumlah Pendapatan		87,890,000.00	41,251,500.00	47	77,385,000.00	41,508,500.00	53.64
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	208,157,000.00	84,113,888.00	40	209,657,000.00	78,355,909.00	37
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		208,157,000.00	84,113,888.00	40	209,657,000.00	78,355,909.00	37

NERACA

PENGADILAN NEGERI GRESIK NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam
rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	6,000,000.00	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	176,137,792,413.00	0.00
Persediaan	C. 1.2	9,555,120.00	5,612,856.00
Jumlah Aset Lancar		176,153,347,533.00	5,612,856.00
JUMLAH ASET		176,153,347,533.00	5,612,856.00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	176,137,792,413.00	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	5,971,609.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.3	6,000,000.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		176,149,764,022.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		176,149,764,022.00	0.00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	3,583,511.00	5,612,856.00
JUMLAH EKUITAS		3,583,511.00	5,612,856.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5,612,856.00	5,612,856.00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI GRESIK

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	40,229,673.00	48,783,598.00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	54,701,500.00	40,390,000.00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	14,000.00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	750,000.00	600,000.00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	0.00
JUMLAH BEBAN		95,681,173.00	89,787,598.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(54,429,673.00)	(48,279,098.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA	D. 10	0.00	0.00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(54,429,673.00)	(48,279,098.00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI GRESIK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	5,612,856.00	4,947,290.00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(54,429,673.00)	(48,279,098.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0.00	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.2	0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0.00	0.00
Lain-lain	E. 4.6	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	52,400,328.00	47,426,204.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(209,345.00)	(852,894.00)
EKUITAS AKHIR	E. 6	3,583,511.00	4,094,396.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gresik

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Negeri Gresik*

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gresik

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Gresik menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Gresik Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Misi Pengadilan Negeri Gresik:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Gresik yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gresik
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di Pengadilan Negeri Gresik melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Program:

1. Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam penerimaan perkara;
2. Peningkatan pelayanan terhadap proses persidangan pemeriksaan perkara;
3. Peningkatan mutu terhadap penyelesaian perkara;
4. Peningkatan mutu terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai;
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan/anggaran;
6. Peningkatan terhadap usaha tata persuratan dan perlengkapan kantor;

• **Kegiatan dibidang Administrasi Kepaniteraan:**

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun 2023 dan menerima pendaftaran perkara tahun 2024 mencatat dalam buku register perkara;
2. Menyelesaikan perkara banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyelesaikan perkara kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyelesaikan perkara peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyampaikan relas panggilan sidang dan tundaan sidang kepada para pihak;
6. Menyampaikan relaas pemberitahuan kepada para pihak baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi serta peninjauan kembali;
7. Menyiapkan berkas perkara untuk dipersidangkan;

8. Membuat berita acara persidangan;
9. Memutus perkara pada tingkat pertama dan mencatat pada buku register;
10. Membuat putusan dan salinannya dicatat pada buku register perkara;
11. Melaksanakan penyitaan dan mencata pada buku register;
12. Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan kepada para pihak;
13. Melaksanakan eksekusi serta mencatat pada buku register;
14. Membuat berita acara eksekusi dan menyerahkan kepada para pihak;
15. Melaksanakan penyelesaian minutasasi berkas perkara, mencatat pada buku register perkara dan memasukkan pada box arsip;
16. Membuat dan mengirmkan laporan perkara bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan;
17. Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berkepentingan;

• **Kegiatan dibidang Administrasi Umum:**

1. Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian;
2. Mengevakuasi data kepegawaian;
3. Membuat surat keputusan tentang kenaikan gaji berkala;
4. Mengelola file kepegawaian;
5. Menertibkan ijin cuti pegawai;
6. Mengolah data dan mengirimkan laporan bulanan dan tahunan dibidang kepegawaian;
7. Mengelola tata persuratan. surat masuk dan surat keluar;
8. Memelihara gedung kantor/sarana dan prasarana serta kebersihan kantor;
9. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan anggaran dipa yang ada;
10. Mengelola perpustakaan kantor;
11. Mengadakan rapat dinas untuk evaluasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan kepada, para hakim dan panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti pejabat struktural kepaniteraan dan kesekretariatan, seluruh staff pegawai dan tenaga honorer;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Gresik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan September, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Pengadilan Negeri Gresik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Gresik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 Juni 2025 dan 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Gresik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lain-lain;
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK SEMESTER I TAHUN 2025

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gresik 30 Juni Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp208.157.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Gresik tidak ada revisi total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar
Pendapatan Rp87.890.000,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp87.890.000,00.
Rp41.251.500,0 Pendapatan Pengadilan Negeri Gresik terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan
0 Pengelolaan BMN serta Pendapatan Lain-Lain.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	8,590,000.00	390,000.00	4.54
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	6,520,000.00	4,000,000.00	61.35
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	15,540,000.00	8,980,000.00	57.79
425239	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	57,240,000	27,881,500.00	48.71
Jumlah SUB Kelompok Pendapatan 4252		87,890,000.00	41,251,500.00	46.94
Jumlah Kelompok Pendapatan 42		87,890,000.00	41,251,500.00	0.00
Jumlah Pendapatan		87,890,000.00	41,251,500.00	46.94

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp10.505.000,,00 atau 7 % dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK SEMESTER I TAHUN 2025

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	8,590,000.00	1,820,000.00	(13,810,500.00)	(758.82)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	6,520,000.00	7,790,000.00	(11,935,500.00)	(153.22)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	15,540,000.00	17,415,000.00	(1,875,000.00)	(10.77)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	57,240,000.00	69,175,500.00	(11,935,500.00)	(17.25)
Jumlah SUB Kelompok Pendapatan		87,890,000.00	96,200,500.00	(8,310,500.00)	(8.64)
Jumlah Kelompok Pendapatan		71,134,000.00	71,134,000.00	-	-
Jumlah Pendapatan		71,134,000.00	71,134,000.00	-	-

31

B.2 Belanja

Realisasi

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Gresik pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp84.113.888,00 atau 46.94% dari anggaran belanja sebesar Rp87.890.000,00.

Belanja

Rp84.113.888,0

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

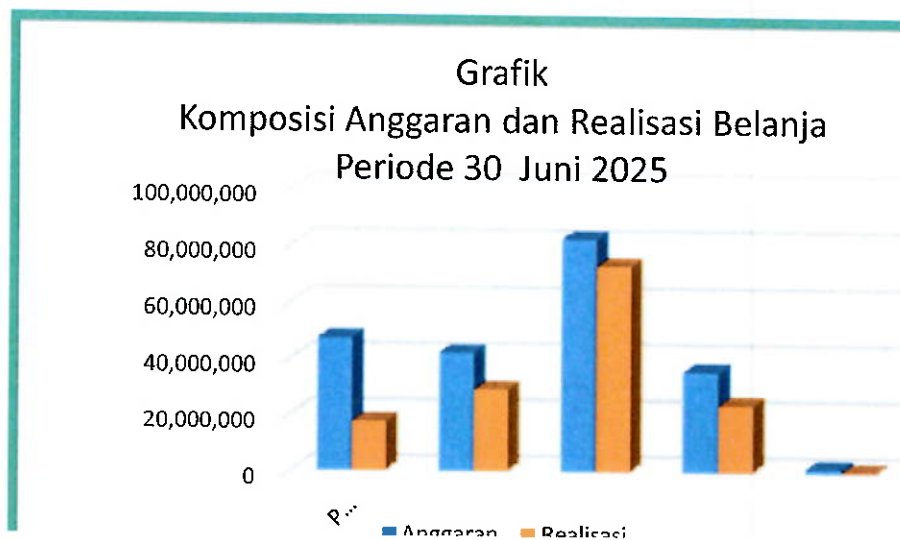
0.

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48,730,000.00	23,519,500.00	48.26
521211	Belanja Bahan	46,147,000.00	13,707,000.00	29.70
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,580,000.00	31,137,388.00	41.20
522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000.00	15,000,000.00	41.67
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000.00	750,000.00	44.12
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		208,157,000.00	84,113,888.00	40.41

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp208.157.000,00 atau sebesar 94% dibandingkan realisasi periode TA 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Pengiriman surat penetapan hari sidang, pemberitahuan salinan dan petikan putusan , pengiriman perkara banding , kasasi dan PK serta pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan yang sudah menggunakan Pos

- Belanja Bahan

Konsumsi makan terdakwa dan konsumsi pengamanan dari pihak kepolisian karena sidang dilakukan secara *offline* (tatap muka)

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Meningkatnya belanja alat tulis kantor karena adanya peningkatan perkara yang masuk

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK SEMESTER I TAHUN 2025

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,519,500.00	38,426,500.00	(14,907,000.00)	(63.38)
Belanja Bahan	13,707,000.00	40,690,500.00	(26,983,500.00)	(196.86)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,137,385.00	90,107,996.00	(58,970,611.00)	(189.39)
Belanja Jasa Konsultan	15,000,000.00	36,000,000.00	(21,000,000.00)	(140.00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000.00	1,500,000.00	(750,000.00)	(100.00)
Jumlah Beban	84,113,885.00	206,724,996.00	(122,611,111.00)	(145.77)
Total	84,113,885.00	206,724,996.00	(122,611,111.00)	(145.77)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Negeri per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp176.153.347.533,00 dan Rp5.612.856,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Saldo UP	6,000,000.00	0.00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0.00	0.00
3	Saldo TUP	0.00	0.00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0.00	0.00
Jumlah		6,000,000.00	0.00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 6. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Kas lainnya di Bendahara Penerimaan	176,153,347,533.00	0.00
Jumlah		176,153,347,533.00	0.00

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp176.149.764.
022,00

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp176.149.764.022,00 dan Rp0,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Gresik merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp176.137.792.
413,00

C.2.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp176.137.792.413,00 dan Rp. 0,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 7. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Dana Titipan Pihak Ketiga (RPL)	176,137,792,413.00	Adanya titipan pihak ketiga / dana perkara (RPL)

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp5.917.609,00

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 Rp5.1917.609,00 dan Rp0,00.

0	<i>Uang Muka dari KPPN</i>	C.4.5. Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 dan Rp. 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.
	<i>Ekuitas</i>	C.5 Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.583.511,00 dan 5.612.856,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp87.890.000,00 dan Rp77.385.000,00. *Rp87.890.000,00* Pendapatan tersebut terdiri dari:
0

Tabel 8. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	87,890,000.00	77,385,000.00	13.57
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		87,890,000.00	77,385,000.00	13.57
Total		87,890,000.00	77,385,000.00	13.57

Pendapatan dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN berasal dari pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan, pendapatan ongkos perkara, dan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gresik.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 205 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp40.229.673,00 dan Rp48.783.598,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 mengalami Kenaikan sebesar (17.534) %.

Tabel 9. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	40,229,673.00	48,783,598.00	(17.53)
Total		40,229,673.00	48,783,598.00	(17.53)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.701.500,00 dan Rp40.390.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK SEMESTER I TAHUN 2025

Tabel 10. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Belanja Barang	54,701,500.00	209,657,000.00	(73.91)
	Total	54,701,500.00	209,657,000.00	(73.91)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	14,000.00	-
	Total	0.00	14,000.00	-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas per30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp750.000,00 dan Rp600.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000.00	600,000.00	25.00
Total		750,000.00	600,000.00	25.00

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas dalam kota pada periode pelaporan 31 Desember 2024 sebesar(90.10%). Hal tersebut disebabkan oleh pengiriman relaas secara pos

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. **Penyusutan dan Amortisasi** Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi **Penyisihan** ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak **Piutang Tak Tertagih** Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 13. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	(100,00)

1

D.9 Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non
Operasional*

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rp0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2025 dan 2024.

Rp0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.612.856,00 dan Rp4.947.290,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp54.429.673,00) dan (Rp48.279.098,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk *wheel chair*.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.583.511,00 dan Rp4.094.396,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 14. Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
JUMLAH	0.00

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.583.511,00 Rp3.583.511,00 dan Rp4.094.396,00.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca Per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Negeri Gresik.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan Per 30 Juni 2025 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Pengadilan Negeri Gresik sampai dengan Per 30 Juni Tahun 2025 sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran : 654440991381000 BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 03 BRI Cabang Gresik diperuntukan Penampung DIPA BADILUM
 2. Rekening Bendahara Pengeluaran : 653240981501000 BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 01 BRI Cabang Gresik diperuntukan Penampung DIPA BUA
 3. Rekening Lainnya : 0006101300003748 RPL 135 PN Gresik Kelas I A
Utk PDT Biaya Perkara Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
- Jumlah Saldo 30 Juni 2025 : 176.137.792.413,00

F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain

Tidak ada pengungkapan penting lain-lain.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 29/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:41 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_sakker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
1	2	4	5	6	7	8	9	
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	87,890,000	41,251,500	(46,638,500)	46.94	77,385,000	41,508,500	(35,876,500)	
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	87,890,000	41,251,500	(46,638,500)	46.94	77,385,000	41,508,500	(35,876,500)	
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	87,890,000	41,251,500	(46,638,500)	46.94	77,385,000	41,508,500	(35,876,500)	
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	
I. Belanja Pemerintah Pusat	208,157,000	84,113,888	(124,043,112)	40.41	209,657,000	78,355,909	(131,301,091)	
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	
2. Belanja Barang	208,157,000	84,113,888	(124,043,112)	40.41	209,657,000	78,355,909	(131,301,091)	
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Dißen Badan Peradilan Umum 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138



Tgl Data : 29/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:41 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025			2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	208,157,000	84,113,888	(124,043,112)	209,657,000	78,355,909	(131,301,091)
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
GRESIK, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
IBNU SOLAH SH., MM.
NIP. 196709071993031001



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 29/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:40 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN		2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN (%)
EKUITAS AWAL		5,612,856	4,947,290	665,566
SURPLUS/DEFISIT-LO		(54,429,673)	(48,279,098)	(6,150,575)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		52,400,328	47,426,204	4,974,124
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,029,345)	(852,894)	(1,176,451)
EKUITAS AKHIR		3,583,511	4,094,396	(510,885)
				(12.48)

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
IBNU SOLA SH., MM.
NIP. 196709071993031001



LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005
UAKPB : 099138
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 29/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:47 AM
Halaman : 1

Kode lap : lap_bmn_intra_satker_

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GRESIK, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
IBNU SOLA S.H., M.M
196709071993031001



DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

117111 Barang Konsumsi

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 29/07/25 10:45 AM
Prg ID : calk_bmn_satker_po

KDSATKER	JNSDOK1	TRN_BMN		RPHREAL
005.03.099138	406	JRNBMN	K01 Habis Pakai	(40,22)
005.03.099138	406	JRNBMN	M02 Pembelian	34,63
005.03.099138	406	JRNBMN	M03 Transfer Masuk	9,53
005.03.099138	999	SAWAL	999 Saldo Awal	5,61
TOTAL				9,55

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 099138
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
JAWA TIMUR
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/07/25 10:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satke
Tgl Data : 29/7/25 8:02 AM



KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGA
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	48,730,000	48,730,000	23,519,500	0	23,519,500	48.26	25,210
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48,730,000	48,730,000	23,519,500	0	23,519,500	48.26	25,210
5212	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
521211	Belanja Barang Non Operasional	46,147,000	46,102,000	13,707,000	0	13,707,000	29.73	32,395
	Belanja Bahan	46,147,000	46,102,000	13,707,000	0	13,707,000	29.73	32,395
5218	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
521811	Belanja Barang Persediaan	46,147,000	46,102,000	13,707,000	0	13,707,000	29.73	32,395
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,580,000	75,625,000	31,137,388	0	31,137,388	41.17	44,487
5221	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218							
522131	Belanja Jasa	75,580,000	75,625,000	31,137,388	0	31,137,388	41.17	44,487
	Belanja Jasa Konsultansi	36,000,000	36,000,000	15,000,000	0	15,000,000	41.67	21,000
5241	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221							
524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	36,000,000	36,000,000	15,000,000	0	15,000,000	41.67	21,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,700,000	1,700,000	750,000	0	750,000	44.12	950
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,700,000	1,700,000	750,000	0	750,000	44.12	950
	JUMLAH BELANJA	208,157,000	208,157,000	84,113,888	0	84,113,888	40.41	124,043

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 29/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:43 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc



KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	84,113,888
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	41,251,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	390,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,000,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	8,980,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	27,881,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,519,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	13,707,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,137,388	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0
JUMLAH			125,365,388	125,365,388

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IBNU SOLA, SH., MM.
196709071993031001



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 29/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:42 AM
Halaman : 1

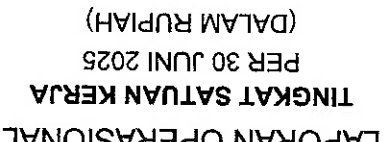
lap_neraca_percobaan_aktual_sakker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	176,137,792,413	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,555,120	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	176,137,792,413
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	5,971,609
0.0	219511	Utang Muka dari KPPN	0	6,000,000
0.0	313111	Ditigihkan ke Entitas Lain	0	84,113,888
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	41,251,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	9,537,940
0.0	391111	Ekuitas	0	5,612,856
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	390,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	4,000,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	8,980,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	27,881,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,519,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	16,182,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultansi	15,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan Konsumsi	40,229,673	0
JUMLAH			176,290,280,206	176,290,280,206

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
IBNU SOLA, SH., MM.
NIP. 196709071993031001





```

Tgl Data   : 30/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak  : 30/07/25 2:11 PM
Halaman    : 1
lap_lo_satker_poc

```

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN (%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	41,251,500	41,508,500	(257,000)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	41,251,500	41,508,500	(257,000)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	41,251,500	41,508,500	(257,000)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0
Beban Pegawai	0	0	0
Beban Persediaan	40,229,673	48,783,598	(8,553,925)
Beban Barang dan Jasa	54,701,500	40,390,000	14,311,500
Beban Pemeliharaan	0	14,000	(14,000)
Beban Perjalanan Dinas	750,000	600,000	150,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Penda	0	0	0
			25

KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESLON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (005) MAHKAMAH AGUNG
: (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
: (0500) JAWA TIMUR
: (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 2:11 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN				2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang				0	0	0	0
Beban Subsidi				0	0	0	0
Beban Hibah				0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial				0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi				0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				0	0	0	0
Beban Transfer ke Daerah				0	0	0	0
Beban Lain-Lain				0	0	0	0
JUMLAH BEBAN				95,681,173	89,787,598	5,893,575	6,564
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL				(54,429,673)	(48,279,098)	(6,150,575)	12.74
KEGIATAN NON OPERASIONAL				0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset				0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset				0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset				0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				(54,429,673)	(48,279,098)	(6,150,575)	12.74
POS LUAR BIASA				0	0	0	0
Beban Luar Biasa				0	0	0	0
POS LUAR BIASA				0	0	0	0
POS LUAR BIASA				0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO				(54,429,673)	(48,279,098)	(6,150,575)	12.74

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGARAN
IBNU SOLA, SH., MM.
NIP. 196709071993031001



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (099138) PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tgl Data : 28/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 29/07/25 10:41 AM
Halaman : 1



NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)
	2025	2024	Jumlah
1	2	3	4
ASET			5
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	0	6,000,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	176,137,792,413	0	176,137,792,413
Persediaan	9,555,120	5,612,856	3,942,264
JUMLAH ASET LANCAR	176,153,347,533	5,612,856	176,147,734,677
JUMLAH ASET	176,153,347,533	5,612,856	176,147,734,677
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	176,137,792,413	0	176,137,792,413
Utang Yang Belum Ditagihkan	5,971,609	0	5,971,609
Utang Muka dari KPPN	6,000,000	0	6,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	176,149,764,022	0	176,149,764,022
JUMLAH KEWAJIBAN	176,149,764,022	0	176,149,764,022
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	3,583,511	5,612,856	(2,029,345)
JUMLAH EKUITAS	3,583,511	5,612,856	(2,029,345)
JUMLAH EKUITAS	3,583,511	5,612,856	(2,029,345)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	176,153,347,533	5,612,856	176,147,734,677
			3,138,290,64

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
IBNU SOLA, SH., MM.
NIP. 196709071993031001